

BUKTI DUKUNG KEGIATAN STRATEGIS
BULAN JANUARI TAHUN 2026

NAMA : MUZAKKIR, S.T., M.T.
NIP : 196709291998031005
PANGKAT/GOL : Pembina Utama Muda / IV/c
JABATAN : KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
INSTANSI : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

1. Kegiatan Perhitungan Pajak dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Surat Undangan Kegiatan Perhitungan Pajak dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Palembang No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352951, Faksimile : (0711) 352951 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 09 Januari 2026

Nomor : 000.1.5/0045/PBJ/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Perhitungan Pajak dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa

Yth. 1. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
3. Seluruh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPTK di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan .
4. Seluruh ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel
di –
Palembang

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Perhitungan Pajak dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Januari 2026
Waktu : 08.30 s.d. 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bina Praja Pemprov. Sumatera Selatan

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu agar hadir tepat waktu. Untuk kelancaran teknis pelaksanaan kegiatan, dapat berkoordinasi dengan menghubungi **Sdri. Nirmala Sari, S.E., M.M. Nomor *Whatsapp* : 0821-7781-2345.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

- Notulen Kegiatan Perhitungan Pajak

NOTULEN	
KEGIATAN PERHITUNGAN PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	
Hari/Tanggal	: Kamis/15 Januari 2026
Jam	: 08.30 s.d. 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Bina Praja Pemprov. Sumatera Selatan
Narasumber	: - Mgs. Rahmat Setiawan, S.E., M.Si. - Dedy Chandra, S,Mn. - Dewi Puspita Sari, S.E.
Peserta	: 1. Perwakilan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 2. Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Selatan 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan 4. PPTK di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan 5. ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel.
=====	
Pembahasan:	
Acara Kegiatan Sosialisasi Perhitungan Pajak dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 80 peserta yang berasal dari Perwakilan BPKAD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan, dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026. Narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur. Tema yang diangkat dalam acara ini "Perhitungan Pajak Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan". Tema yang dibahas antara lain:	
I. Ketentuan dan mekanisme perpajakan pada Instansi Pemerintah , khususnya kewajiban bendahara dan pejabat terkait dalam melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak melalui sistem Coretax .	
II. Implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meliputi pendaftaran, pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik	
KESIMPULAN	
1. Dasar Hukum : PMK Nomor 231/PMK.03/2019, PMK Nomor 59/PMK.03/2022 dan PER-11/PJ/2025 dan ketentuan turunan lainnya terkait Bukti Potong dan SPT.	
2. Subjek dan Ruang Lingkup : Subjek : - Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab meliputi PA, KPA, Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Ruang lingkup kewajiban meliputi: - Pemotongan/pemungutan pajak, - Penyetoran pajak, - Pelaporan SPT Masa sebelum dan sesudah transaksi.	

3. Jenis Pajak yang Dikelola Instansi Pemerintah

- Pajak Penghasilan (PPh): PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi BKP/JKP tertentu.
- Penerapan PPh Unifikasi, yaitu satu bukti potong/pungut untuk beberapa jenis PPh.

4. Ketentuan Bukti Potong/Pungut

- Bukti potong wajib dibuat untuk setiap transaksi yang terutang pajak, termasuk kondisi nihil (karena PTKP, SKB, tarif 0%, PPh DTP, atau fasilitas pajak).
- Bukti potong harus memuat identitas lengkap pihak dipotong/pungut, objek pajak, tarif, DPP, dan masa pajak.
- Disampaikan kepada penerima penghasilan dan dilaporkan melalui SPT Masa.

5. Transaksi Khusus

- UMKM:
 - o Tarif 0,5% dengan Surat Keterangan (PP 55).
 - o Tanpa Surat Keterangan dikenakan tarif normal (PPh 22/PPH 23).
- Pengecualian pemotongan/pemungutan antara lain transaksi melalui SIPP dan pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.
- Wajib Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 26): tarif 20% atau sesuai P3B apabila menyerahkan SKD.

6. PPN Instansi Pemerintah

- Pemungutan PPN dilakukan atas transaksi dengan PKP Rekanan.
- Faktur Pajak dibuat oleh PKP Rekanan dengan kode yang ditentukan.
- Penyetoran dan pelaporan PPN mengikuti ketentuan masa pajak PPN.

7. Penyetoran dan Pelaporan

- Penyetoran pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Pelaporan SPT Masa:
 - PPh Pasal 21/26 dan Unifikasi : paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
 - PPN : paling lambat akhir bulan berikutnya.
- Diperkenalkan Deposit Pajak sebagai mekanisme pembayaran di muka untuk menghindari sanksi keterlambatan.

8. Tujuan Penerapan Coretax

- Meningkatkan kepatuhan dan akurasi administrasi perpajakan Instansi Pemerintah.
- Menyederhanakan proses perpajakan melalui satu sistem terintegrasi.
- Mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

9. Pihak yang Berperan

- Pengguna Coretax di Instansi Pemerintah meliputi:
 - ~ Pengguna Layanan Administrasi (PIC),
 - ~ Bendahara Pengeluaran,
 - ~ Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM),
 - ~ PA/KPA sesuai kewenangan.
- Setiap peran memiliki hak akses dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem.

10. Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah

- Pemotongan/Pemungutan Pajak
 - o Dilakukan atas transaksi belanja pemerintah yang menimbulkan kewajiban pajak.
 - o Meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final, serta PPN sesuai ketentuan.

- Pembuatan Bukti Potong/Pungut
 - o Dibuat melalui Coretax.
 - o Wajib diterbitkan untuk setiap transaksi, termasuk transaksi dengan tarif 0% atau nihil.
- Penyetoran Pajak
 - o Menggunakan kode billing yang diterbitkan melalui Coretax.
 - o Disetorkan paling lambat sesuai batas waktu yang ditentukan per jenis pajak.
- Pelaporan SPT Masa
 - o Dilakukan secara elektronik melalui Coretax.
 - o Bukti potong/pungut menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPT Masa.

11. Mekanisme Administrasi melalui Coretax

- Pendaftaran dan pemutakhiran data Instansi Pemerintah.
- Perekaman transaksi dan perhitungan pajak otomatis.
- Penerbitan bukti potong/pungut dan kode billing.
- Pemantauan status penyetoran dan pelaporan pajak.

12. Ketentuan Khusus

- Terdapat transaksi tertentu yang dikecualikan dari pemotongan/pemungutan, sesuai ketentuan perpajakan.
- Kesalahan administrasi dapat diperbaiki melalui mekanisme pembetulan dalam Coretax.
- Keterlambatan penyetoran atau pelaporan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi.

13. Kesimpulan Akhir:

- a. Instansi Pemerintah wajib memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib melalui Coretax, termasuk pembuatan bukti potong/pungut, penyetoran tepat waktu, dan pelaporan SPT sesuai ketentuan. Kepatuhan ini penting untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.
- b. Implementasi Coretax menuntut Instansi Pemerintah, khususnya bendahara dan pejabat terkait, untuk memahami alur dan kewajiban perpajakan secara menyeluruh. Penggunaan Coretax secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, efisiensi administrasi, serta mendukung tata kelola keuangan pemerintah yang akuntabel.
- c. Pemotongan PPh 21 bagi ASN dari bulan Januari s.d. November 2025 bersifat Sementara, pada bulan Desember 2025 baru bersifat Fix dengan memberlakukan sistem TER.
- d. Bukti Potong A2 bisa langsung terkirim ke Akun Cortex masing-masing PNS
- e. Wanita Kawin dengan Status TK/0 agar penghasilannya digabung dengan suaminya, untuk menghindari kurang bayar pada Bukti Potong A2 dan dilakukan penonaktifan pajaknya.

14. Diskusi dan Tanya Jawab

- a. Bendahara belum memahami dan mengalami kendala dalam pembuatan bukti potong A2 melalui Coretax?
- b. Cara Perhitungan Pajak dalam e Catalog?
- c. Tarif PPn 11% atau 12% dan Cara Perhitungannya?
- d. Adanya kasus salah bayar pajak pada proses Pengadaan Barang dan Jasa?

- e. Adanya kasus kurang bayar PPh 21 bagi ASN pada akhir tahun 2025 dan sudah berjalan dari tahun 2022.

15. Solusi

- a. Bimtek praktik langsung (*hands-on*) penggunaan Coretax dan Simulasi pembuatan Bukti Potong A2, pembetulan, dan pelaporan SPT
- b. Paparan ketentuan pajak dalam e-Catalog, Studi kasus transaksi riil Pengadaan Barang dan Jasa dan Diskusi kesalahan umum dan solusinya
- c. Penjelasan ketentuan tarif PPN yang berlaku, Simulasi perhitungan PPN berdasarkan tanggal terutang
- d. Konsultasi langsung kasus per instansi Pendampingan penyelesaian pemindahbukuan dan pembetulan

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN



MUZAKKIR, ST, MT.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196709291998031005

NOTULEN,
KEPALA SUB BAGIAN
PEMANTAUAN DAN EVLUASI



NIRMALA SARI, S.E., M.M.
NIP. 198006302010012008

2. Pendampingan Penginputan SIRUP bagi OPD di Lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Selatan
- Surat Undangan Pendampingan Penginputan SIRUP bagi OPD di Lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faximilie : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id - Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 07 Januari 2026

Nomor : 000.1.5/0033/PBJ/VI/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 berkas
Hal : **Undangan Pendampingan
Peng-input-an SIRUP pada
Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di Provinsi Sumatera
Selatan**

Kepada :
Yth. Kepala OPD (terlampir)
di –
Tempat

Dalam rangka mendukung Penilaian MCP KPK dan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan perolehan skor indikator dalam penilaian ITKP dan MCP KPK, khususnya untuk indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan. Berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD. Pengumuman dilakukan melalui Aplikasi SIRUP paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahunannya.

Untuk itu, mohon perkenan Kepala OPD (terlampir) untuk menugaskan 3 (dua) orang admin SIRUP untuk menghadiri acara dimaksud dengan membawa Laptop dan DPA masing-masing, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu dan Kamis / 21 dan 22 Januari 2026 (jadwal terlampir)
Pukul : 08.00 wib s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Bina Praja Lantai 2 Setda Prov. Sumsel
Acara : Pendampingan Peng-input-an SIRUP bagi OPD di Lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Selatan

Untuk lebih jelas dapat menghubungi narahubung sdri. Arindona,
WhatsApp: 081267513013.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

Tembusan :
-Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Rekapitulasi Penginputan RUP di Pemprov. Sumsel

REKAPITULASI PENGINPUTAN RUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN									
TAHUN ANGGARAN 2026									
No	Satuan Kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1	Badan Kepegawaian Daerah	5	755	0	0	0	0	5	755
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	-	0	0	0	0	0	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	-	0	0	0	0	0	-
4	Badan Pendapatan Daerah	25	19,701	0	0	0	0	25	19,701
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	-	0	0	0	0	0	-
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6	3,422	0	0	0	0	6	3,422
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5	155	0	0	0	0	5	155
8	Badan Penghubung	3	116	0	0	0	0	3	116
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	703	0	0	0	0	6	703
10	Biro Administrasi Pembangunan	0	-	0	0	0	0	0	-
11	Biro Hukum	0	-	0	0	0	0	0	-
12	Biro Humas dan Protokol	0	-	0	0	0	0	0	-
13	Biro Kesejahteraan Rakyat	0	-	0	0	0	0	0	-
14	Biro Organisasi	0	-	0	0	0	0	0	-
15	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0	-	0	0	0	0	0	-
16	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	20	860	0	0	0	0	20	860
17	Biro Perencanaan	0	-	0	0	0	0	0	-
18	Biro Umum	1	255	0	0	0	0	1	255
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	1,328	0	0	0	0	3	1,328
20	Dinas Kearsipan	0	-	0	0	0	0	0	-
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5	765	0	0	0	0	5	765
22	Dinas Kehutanan	2	1,054	0	0	0	0	2	1,054
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	-	0	0	0	0	0	-
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	461	0	0	0	0	2	461
25	Dinas Kesehatan	6	6,492	0	0	0	0	6	6,492
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0	-	0	0	0	0	0	-
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	-	0	0	0	0	0	-
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	-	0	0	0	0	0	-
29	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0	-	0	0	0	0	0	-
30	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	3	1,285	0	0	0	0	3	1,285
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	-	0	0	0	0	0	-
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	421	0	0	0	0	6	421
33	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	1,842	0	0	0	0	5	1,842

No	Satuan Kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	-	0	0	0	0	0	-
35	Dinas Pendidikan	4	2,116	0	0	0	0	4	2,116
36	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	14	5,051	0	0	0	0	14	5,051
37	Dinas Perdagangan	1	42	0	0	0	0	1	42
38	Dinas Perhubungan	2	770	0	0	0	0	2	770
39	Dinas Perindustrian	0	-	0	0	0	0	0	-
40	Dinas Perkebunan	0	-	0	0	0	0	0	-
41	Dinas Perpustakaan	0	-	0	0	0	0	0	-
42	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	1,647	0	0	0	0	2	1,647
43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	-	0	0	0	0	0	-
44	Dinas Sosial	7	537	0	0	0	0	7	537
45	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	360	0	0	0	0	2	360
46	Inspektorat	13	4,045	0	0	0	0	13	4,045
47	RS Eraldi Bahar	59	19,607	47	19,138	0	0	106	38,745
48	RS Gigi dan Mulut (OBK) BLU	3	1,019	0	0	0	0	3	1,019
49	RS. Mata (OBK) BLU	1	28	0	0	0	0	1	28
50	RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK) BLU	6	32,508	0	0	0	0	6	32,508
51	Satuan Polisi Pamong Praja	1	283	0	0	0	0	1	283
52	Sekretariat DPRD	10	12,406	0	0	0	0	10	12,406
TOTAL		228	120,074	47	19,138	0	0	276	139,212

Catatan:
Data rekap terakhir diperbaharui pada tanggal 19 Januari 2025 01:46
Data pagu ditampilkan dalam satuan juta rupiah

BUKTI DUKUNG KEGIATAN STRATEGIS
BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

NAMA : MUZAKKIR, S.T., M.T.
NIP : 196709291998031005
PANGKAT/GOL : Pembina Utama Muda / IV/c
JABATAN : KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
INSTANSI : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

1. Bimtek Kontrak Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kerjasama antara LKPP dan Pemprov. Sumsel
- Surat undangan Bimtek Kontrak Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kerjasama antara LKPP dan Pemprov. Sumsel



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (Audiog) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 2576/D.4.3/02/202602 Februari 2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan

Yth. **Daftar Undangan (Terlampir)**
di Tempat

Pelaksanaan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sering menghadapi tantangan, mulai dari ketidaksesuaian perancangan, pengendalian, serah terima, hingga potensi sengketa yang merugikan. Kondisi ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan PBJP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat guna dari setiap dana yang dibelanjakan. Oleh karena itu, terdapat urgensi nyata untuk memperkuat kemampuan Pelaku Pengadaan dalam perancangan kontrak yang efektif, mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko, serta memahami prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bermaksud menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema **"Manajemen Kontrak Komprehensif (Rancangan, Implementasi, dan Penyelesaian Masalah) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"** kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PA/KPA/PPK/PPTK), APIP serta Biro Hukum pada lingkungan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Bersama ini kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat menunjuk Pejabat/Pegawai yang terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan instansi Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026

Waktu : 08:00 - 15:00 WIB (susunan acara terlampir)

Tempat : Auditorium Graha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapt. A. Rivai No. 3 Palembang

Mengingat keterbatasan kapasitas ruangan, Peserta Bimbingan Teknis hanya dibatasi sampai dengan 200 (dua ratus) Peserta, mohon Bapak/Ibu melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan <https://bit.ly/4brDnjt>. Apabila kuota Bimbingan Teknis tersebut telah terpenuhi, Peserta akan diarahkan untuk mengikuti kegiatan secara daring (tautan akan diinformasikan kemudian).

Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini tidak dipungut biaya bagi Peserta. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi narahubung kami: Sdr. Yoma Triadi Busra (0821-2006-6608) atau Sdr. Dipo Adi Negoro (0857-1211-6090).

Demikian disampaikan, besar harapan kami agar kegiatan ini dapat dihadiri dan terselenggara dengan baik. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan
Hukum,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eeoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : Fu1934

Nomor Tiket : SK202460202007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Raden Ari Widianto

Tembusan :
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP

- Kegiatan Bimbingan Teknis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Sumsel. di Auditorium Pemprov. Sumsel, 10 Februari 2026



2. Bimbingan Teknis Katalog Konstruksi Versi 6

- Surat Undangan Bimbingan Teknis Katalog Konstruksi Versi 6



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30129 Tlp (0711) 352388 - 354122 Fax (0711) 357483
E_mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 19 Januari 2026

Nomor : 000.1.5/0110/PBJ/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Undangan

Yth. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan “Bimbingan Teknis Katalog Konstruksi Versi 6”, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menugaskan Pejabat Struktural yang membidangi Pengadaan barang dan Jasa sebanyak 1 (satu) orang untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Februari 2026
Waktu : Pk. 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Hotel Swarna Dwipa Palembang
Note : Membawa Laptop

untuk informasi lainnya dapat menghubungi Sdr. Periansa No.*Whatsapp* : 0812-78331119.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

Tembusan Yth. :
Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)

- Kegiatan Bimtek Katalog Konstruksi V.6
12 Februari 2026 di Hotel Swarna Dwipa Palembang



BUKTI DUKUNG KEGIATAN STRATEGIS
BULAN APRIL TAHUN 2026

NAMA : MUZAKKIR, S.T., M.T.
NIP : 196709291998031005
PANGKAT/GOL : Pembina Utama Muda / IV/c
JABATAN : KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
INSTANSI : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pembuktian Kualifikasi Konsolidasi HVS
- Undangan Pembuktian Kualifikasi Konsolidasi HVS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai Palembang No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352951, Faksimile : (0711) 352951 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 08 April 2026

Nomor : 01/UND.PK/KONSOLIDASI/IV/2026

Lampiran : -

Hal : Undangan Pembuktian Kualifikasi Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Produk Dalam Negeri Wilayah Sumatera Selatan Untuk Katalog Elektronik Provinsi Sumatera Selatan.

Kepada Yth. Pimpinan Perusahaan (terlampir)

di – Tempat

Dengan ini Kami mengundang Saudara/i untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Produk Dalam Negeri Wilayah Sumatera Selatan Untuk Katalog Elektronik Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

Tempat

Hari dan Tanggal

Waktu

Yang Harus Dibawa

Yang harus hadir

: Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Sumsel

: Kamis / 09 April 2026

: 07.30 s.d 16.00 am WIB

: Sebagai bahan pembuktian kualifikasi diminta agar Saudara/i membawa asli dokumen yang sah dan menyerahkan salinannya, seperti yang tertera pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam dokumen Pemilihan

: Direksi atau penerima kuasa dari direksi yang tercantum dalam akta pendirian/perubahan, atau pihak lain yang bukan direksi berstatus sebagai tenaga kerja tetap dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 atau Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat, atau Pejabat yang menurut Perjanjian KSO berhak mewakili KSO.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

TTD

Pokja Pemilihan Konsolidasi Pengadaan HVS
Wiliayah Provinsi Sumatera Saelatan Untuk Katalog Elektronik
Provinsi Sumatera Selatan

2. Negosiasi Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Produk Dalam Negeri Wilayah Sumatera Selatan Untuk Katalog Elektronik Provinsi Sumatera Selatan.

- Surat Undangan Negosiasi Konsolidasi HVS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Palembang No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352951, Faksimile : (0711) 352951 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 14 April 2026

Nomor : 01/UND.NEGOSIASI/KONSOLIDASI/IV/2026 Kepada Yth. Pimpinan
Lampiran : - (terlampir)
Hal : Undangan Negosiasi Konsolidasi Pengadaan di -
Kertas HVS Produk Dalam Negeri Wilayah Tempat
Sumatera Selatan Untuk Katalog Elektronik
Provinsi Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Konsolidasi Kertas HVS Provinsi Sumatera Selatan, Dengan ini Kami mengundang Saudara/i untuk mengikuti Negosiasi Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Produk Dalam Negeri Wilayah Sumatera Selatan Untuk Katalog Elektronik Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa dokumen struktur pembentuk harga satuan penawaran dan/atau Dokumen pendukung survey harga pasar, tahapan negosiasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal	: Rabu / 15 April 2026
Waktu	: 08.00 s.d selesai
Tempat	: Hotel Swarnadwipa Palembang (Ruang dempo Lantai 2)
Yang harus hadir	: Direksi yang tercantum dalam akta pendirian/perubahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

TTD

Pokja Pemilihan Konsolidasi Pengadaan HVS
Wilayah Provinsi Sumatera Saelatan Untuk Katalog Elektronik
Provinsi Sumatera Selatan

- Dokumentasi Kegiatan Negosiasi Konsolidasi HVS



**BUKTI DUKUNG KEGIATAN STRATEGIS
BULAN MEI TAHUN 2026**

NAMA : MUZAKKIR, S.T., M.T.
NIP : 196709291998031005
PANGKAT/GOL : Pembina Utama Muda / IV/c
JABATAN : KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
INSTANSI : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

1. Workshop Reviu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026
- Undangan Workshop Reviu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai Palembang No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352951, Faksimile : (0711) 352951 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 27 April 2026

Nomor : 000.1.5/1003/PBJ/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Workshop Reviu
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2026

Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan
di -
Palembang

Sehubungan dengan akan diselenggarakan kegiatan **"Workshop Reviu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026"** dengan ini diminta Saudara menugaskan Kepala Subbagian Perencanaan/Umum 1 orang untuk mengikuti kegiatan workshop dimaksud. yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 04 Mei 2026
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempa : Ruang Rapat Bina Praja Prov. Sumsel (Lantai 2)
Agenda/Jadwal : Terlampir

Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara ini dapat menghubungi Sdra. Khairul Shobirin, S.T. (082281531289) dan Sdra. Afriza Habibina, S.T. (082378083988).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

- Dokumentasi Kegiatan Workshop Reviu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026



2. Kegiatan Pengadaan barang jasa yang dikecualikan

- Surat Undangan Kegiatan Pengadaan barang jasa yang dikecualikan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30129 Tlp (0711) 352388 - 354122 Fax (0711) 357483
E_mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 14 April 2026

Nomor : 000.1.5/0880/PBJ/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Undangan

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan “Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”, dengan ini diminta kepada Saudara menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen 1 (satu) orang untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu s.d Kamis / 6 s.d 7 Mei 2026 (Jadwal Terlampir)
Waktu : Pk. 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro PBJ (Lantai 2) Prov. Sumatera Selatan

untuk informasi lainnya dapat menghubungi Sdr. Periansa No.*Whatsapp* : 0812-78331119.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

Tembusan Yth. :
Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)

- Dokumentasi Kegiatan Pengadaan barang jasa yang dikecualikan



**BUKTI DUKUNG KEGIATAN STRATEGIS
BULAN JUNI TAHUN 2026**

NAMA : MUZAKKIR, S.T., M.T.
NIP : 196709291998031005
PANGKAT/GOL : Pembina Utama Muda / IV/c
JABATAN : KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
INSTANSI : BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Produk Dalam Negeri Untuk Katalog Elektronik Provinsi Sumatera Selatan
- Undangan Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Produk Dalam Negeri Untuk Katalog Elektronik Provinsi Sumatera Selatan



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai Palembang No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352951, Faksimile : (0711) 352951 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 02 Juni 2026

Nomor : 800/1376/PBJ/VI/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (Tiga) berkas
Hal : Undangan Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Produk Dalam Negeri Untuk Katalog Elektronik Provinsi Sumatera Selatan.

Yth. PA / KPA & 1 Orang PPTK

(Daftar Terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan Pengumuman dan Penetapan Pemenang Kegiatan Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Produk Dalam Negeri untuk Katalog Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan ini Kami mengundang Bapak/Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS yang akan dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Selasa / 09 Juni 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Auditorium Bina Praja Prov. Sumsel
Acara : Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS untuk Katalog Elektronik Provinsi Sumatera Selatan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara/i diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



EDWARD CANDRA

- Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS Produk Dalam Negeri Untuk Katalog Elektronik Provinsi Sumatera Selatan



2. Rapat Tindak Lanjut Klarifikasi PBJ Tahun 2025 dan 2026

- Undangan Rapat Tindak Lanjut Klarifikasi PBJ Tahun 2025 dan 2026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30129 Tlp (0711) 352388 - 354122 Fax (0711) 357483
Email : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 21 Mei 2026

Nomor : 800/0790/PBJ/VI/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.
1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
4. PPTK dan PPK pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik
6. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
7. Para Jafung Madya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Menindaklanjuti Surat dari FAKTA Nomor : 490/FAKTA/SS/KFV/2026 Tanggal 11 Mei 2026 dan Surat dari Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI Sumsel) Nomor : 017/K-MAKI/Konfirmasi/V/2026 Tanggal 19 Mei 2026, dengan ini diharapkan kepada Saudara untuk hadir, pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 3 Juni 2026
Waktu : Pukul 09.00 s.d 13.00
Tempat : Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang/Jasa Lantai 2
Agenda : Masukan Tindak Lanjut Klarifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2026

Demikian disampaikan, atas kehadiran diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa
Setda Prov. Sumsel,



Muzakir, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196709291998031005

Tembusan :
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (sebagai laporan)

- Dokumentasi Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Klarifikasi PBJ Tahun 2025 dan 2026

